

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi, artinya ada pelibatan masyarakat yang begitu besar dalam perencanaan maupun pembuatan kebijakan. Hal ini pun termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “Kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan menurut UUD”. Kedaulatan rakyat yang di maksud yaitu rakyat mempunyai kewenangan untuk memilih orang-orang atau kader partai politik untuk duduk dilembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Salah satu bentuk melaksanakan dan mendukung sistem demokrasi adalah dengan Pemilihan Umum (Pemilu). Menurut Sardini (2011) dalam sebuah negara demokrasi, Pemilu sebagai pilar utama proses akumulasi kehendak warga negara serta serta prosedur demokrasi pemilihan pemimpin. Dalam kegiatan ini, ruang partisipasi akan lebih terbuka luas bagi masyarakat, maka salah satu hal penting dalam penyelenggaraan Pemilu adalah partisipasi.

Kedaulatan rakyat yang belangsung dalam kegiatan Pemilu ternyata tidak sesuai dengan konsep demokrasi yang semestinya. yaitu adanya pelibatan masyarakat yang begitu besar untuk memilih pemimpin bangsa ini. Terlihat dari tingkat partisipasi masyarakat yang cenderung menurun dari Pemilu ke Pemilu. Hal tersebut dapat kita lihat melalui tabel berikut:

Table 1.1
Partisipasi Pemilihan Umum Tahun 2004-2019

No	Pemilu Tahun	Pilpres	Pemilu Legislatif
1.	2004	77.44%	84.07%
2.	2009	72.58%	70.99%
3.	2014	71.31%	75.11%
4.	2019	81.97%	81.69%

Sumber: Dihimpun dari KPU Tahun 2019

Berdasarkan tabel 1.1 partisipasi politik masyarakat yang cenderung menurun dari Pemilu ke Pemilu, dikhawatirkan dapat menimbulkan turunnya legitimasi masyarakat terhadap pemerintah. Hal ini bertolak belakang dengan konsep demokrasi yang semestinya. Fenomena ini membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah demi keberhasilan Pemilu yang akan datang.

Pada tahun 2019 Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyelenggarakan Pemilu serentak. Hal itu termuat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 terkait Pemilu. Pemilu ini menjadi sejarah baru bagi Bangsa Indonesia, mengingat ini adalah kali pertama Bangsa Indonesia melakukan kegiatan Pemilu secara serentak. Salah satu provinsi yang melaksanakan Pemilu serentak ialah Provinsi Jawa Tengah, diikuti oleh 29 kabupaten dan 6 kota, sedangkan untuk masyarakat yang memiliki hak memilih serta terdaftar sebagai pemilih tetap jumlahnya sebesar 27.896.902 pada 115.391 TPS.

Untuk meningkatkan partisipasi dalam Pemilu serentak ini, maka dibentuklah tim relawan oleh KPU yang dikenal sebagai Relawan Demokrasi (Relasi), dengan tugas melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih agar partisipasi serta kualitas pemilih dalam mempergunakan hak pilihnya dapat meningkat. Hal tersebut termuat

dalam Surat KPU RI Nomor 32/PP.08-SD/06/KPU/I/2019. Harapan bentuk partisipasi masyarakat ini bisa mendorong munculnya kesadaran yang tinggi serta tanggung jawab yang penuh oleh masyarakat dalam mempergunakan hak pilihnya secara optimal.

Pengadaan program ini dikarenakan terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap menurunnya tingkat partisipasi masyarakat diantaranya yaitu kejenuhan masyarakat terhadap frekuensi penyelenggaraan Pemilu, ketidakpuasan masyarakat dengan kerja sistem politik dikarenakan tidak adanya perbaikan kualitas hidup, mal-administrasi penyelenggaraan Pemilu, terdapatnya paham keagamaan anti-demokrasi serta kesadaran masyarakat terkait Pemilu sebagai transformasi sosial semakin lemah

Program ini menggandeng beberapa kelompok masyarakat yang mencakup dalam sebelas basis pemilih strategis yakni basis keluarga, basis pemilih pemula, basis pemilih muda, basis pemilih perempuan, basis penyandang disabilitas, basis pemilih berkebutuhan khusus, basis kaum marginal, basis komunitas, basis keagamaan, basis warga internet dan basis Relawan Demokrasi. Dibentuknya pelopor demokrasi pada tiap basis diharapkan dapat menjadi penyuluh dalam tiap komunitasnya.

Menurut Sardini (2019) kehadiran Relawan Demokrasi (Relasi), harus memperoleh nilai tambah dalam Penyelenggaraan Pemilu tahun 2019, diantaranya:

1. *Fungsi mediator*, yakni unit kerja dengan tugas untuk mendekatkan jarak antara KPU dengan unit-unit pemilih yang selama ini sulit dijangkau;

2. *Fungsi agensi demokrasi*, yakni perangkat KPU dengan peran sebagai tempat bertanya, menyebarluaskan informasi, dan peran umpan balik dari KPU ke segmen pemilih strategis dan sebaliknya;
3. *Fungsi edukasi*, yakni memberikan penerangan-penerangan kepada segmen pemilih meningkat membangkitkan kesadaran pemilih yang memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara pemilih;
4. *Fungsi solusi*, yakni membantu segmen pemilih jika terdapat permasalahan mengenai daftar pemilih dan/atau persoalan teknik lainnya dalam Pemilu

Dalam kegiatan Pemilu yang berlangsung di Provinsi Jawa Tengah, diketahui bahwa Kota Salatiga menjadi daerah dengan tingkat partisipasi tertinggi sedangkan Kabupaten Brebes menjadi daerah dengan tingkat partisipasi terendah dalam Pilpres 2019. Data tersebut dirangkum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1. 2
Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019

No	Daerah	Partisipasi		
		Pemilih	Hak Memilih	Partisipasi
1.	Kota Salatiga	140.960	123.984	87.96%
2.	Kabupaten Brebes	1.552.779	1.085.284	69.89%

Sumber: KPU Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

Berdasarkan tabel 1.2 Kota Salatiga menjadi daerah dengan tingkat partisipasi tertinggi. Dari 140.960 masyarakat yang terdaftar, sebanyak 123.984 masyarakat yang menggunakan hak pilihnya, dengan begitu tingkat partisipasi di Kota Salatiga mencapai 87,96%. Hal ini menarik, pasalnya menurut riset yang dilakukan oleh Setara Institute, Kota Salatiga dinobatkan menjadi kota/daerah tertoleran seIndonesia. Dengan keberagaman yang dimiliki, mampu diwujudkan

kehidupan toleran dalam Kota ini, sehingga penyebutan kota ini yakni “Kota Miniatur Indonesia yang Majemuk”. Selain itu keberagaman yang mereka miliki tidak mengurangi antusiasme masyarakat dalam proses Pemilu. Masyarakat Salatiga menyalurkan aspirasinya dalam pemilihan pemimpin selama lima tahun, pemilihan ini tanpa adanya paksaan, ancaman, hoax, isu SARA sehingga sesuai dengan hati nurani mereka.

Disisi lain Kabupaten Brebes menjadi daerah dengan tingkat partisipasi terendah. Dari 1.552.779 masyarakat yang terdaftar, sebanyak 1.085.284 yang menggunakan hak pilihnya, dengan demikian tingkat partisipasi di Kabupaten Brebes mencapai 69,89%. Saat pemilihan berlangsung, masih banyak masyarakat yang enggan mengurus proses pemindahan hak memilihnya padahal Kabupaten Brebes memiliki jumlah serta mobilitas penduduk yang tinggi. Alasan mereka enggan mengurus proses pemindahan hak memilih yaitu dinas luar, tugas belajar dan lain sebagainya. Hal itu menyebabkan tingkat partisipasi Kabupaten Brebes menjadi yang terendah.

Berdasarkan angka partisipasi pemilih diatas dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan tingkat partisipasi dimana masih ada daerah dengan tingkat partisipasi yang belum melampaui target. Lemahnya partisipasi masyarakat di bidang politik akan menimbulkan melemahnya kekuatan politik, serta sikap apatis masyarakat yang akan menghambat perpumbuhan politik di Inonesia. Dikarenakan jika sikap apatis muncul di kalangan masyarakat maka akan menjadi ancaman terbesar pada kekuatan politik. Dalam menghadapi permasalahan ini, peran Relawan Demokrasi sangat diperlukan guna membantu KPU dalam melaksanakan sosialisasi serta

pendidikan pemilih agar lebih teredukasi dan memiliki kesadaran dalam menggunakan hak pilihnya.

Dalam pelaksanaan penelitian ini diperlukannya hasil penelitian terdahulu sebagai referensi peneliti. Berdasarkan penelitian oleh Alamsyah (2020) mengangkat isu tentang Peran Relawan Demokrasi dalam Pemilu di Kota Medan pada tahun 2019. Penelitian tersebut menekankan pada kinerja Relawan Demokrasi dengan peranan yang dijalankan sesuai karakternya dalam kegiatan sosialisasi Pemilu yakni sebagai penyuluh Pemilu serta menanamkan nilai demokrasi di segmen masyarakat. Selain itu, penelitian yang dilakukan Arianto (2014) mengangkat isu terkait “Fenomena relawan dalam Kontestasi Presidensial 2014.” Penelitian ini menekankan bagaimana kontestasi presidensial 2014 yang diwarnai oleh kehadiran perdana relawan politik pada saat Pemilu 2014 tujuannya yakni agar partisipasi aktif masyarakat dapat meningkat. Terakhir, berdasarkan penelitian yang dilakukan Kholidaturrosyidah (2014) yang menekankan bahwa Relawan Demokrasi membawa dampak untuk menekan angka golput serta menumbuhkan partisipasi masyarakat pada pelaksanaan Pemilu. Relawan Demokrasi telah menjalankan perannya yaitu dengan menjalankan agenda sosialisasi untuk mentransfer informasi kepada masyarakat terkait Pemilu, dan mendorongnya agar mempergunakan hak pilihnya.

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, timbulah ketertarikan peneliti melaksanakan penelitian dengan membandingkan Peran Relawan Demokrasi KPU Kota Salatiga dan KPU Kabupaten Brebes dalam Pemilu tahun 2019 pasalnya program ini sebagai terobosan baru bagi KPU untuk meningkatkan

partisipasi masyarakat. Permasalahan tersebut dituangkan dalam judul “Peranan ‘Relawan Demokrasi’ Komisi Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 di Provinsi Jawa Tengah.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peranan Relawan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 di Provinsi Jawa Tengah?
2. Faktor-faktor apakah yang menghambat dan mendukung peranan Relawan Demokrasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Menganalisis peranan Relawan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 di Provinsi Jawa Tengah.
2. Menemukan faktor-faktor yang memudahkan dan yang menghambat Relawan Demokrasi Komisi Pemilihan Umum dalam menjalankan program.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pengayaan konsep partisipasi politik dalam Pemilu, voluntarisme di dalam penyelenggaraan Pemilu, dan faktor budaya dalam meningkatkan partisipasi, sebagai bagian dari pengembangan konsep dan/atau teori dalam ilmu pemerintahan dan/ilmu politik.

1.4.2 Secara Praktis

a. Bagi Penyelenggara Pemilu

Ditinjau dari manfaat praktisnya, harapannya hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi penyelenggara Pemilu untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilu selanjutnya.

b. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan peneliti dengan banyak membaca referensi dan juga buku-buku, serta dengan terjun langsung ke lapangan dapat mempermudah peneliti mengetahui gejala dan kondisi masyarakat yang sebenarnya sehingga sesuai dengan tujuan penelitian dalam rangka memperoleh data. Dalam hal ini peneliti dapat memperoleh pemahaman tentang peran dan hambatan KPU dalam menjalankan program Relawan Demokrasi di Jawa Tengah.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Peneliti melakukan tinjauan pustaka terhadap peneliti-peneliti yang telah dilakukan sebelumnya berdasarkan pengamatan kepustakaan yang peneliti lakukan, kajian mengenai Peran Program Relawan Demokrasi. Peneliti mengambil beberapa penelitian sebagai referensi untuk memperkaya kajian penelitian ini. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang dilakukan:

- a) Analisis Peran Relawan Demokrasi Pada Pemilihan Umum Di Kota Medan Tahun 2019. Ditulis oleh Alamsyah, Mas Indra Putra (2020)

Hasil dari riset ini, meliputi: *pertama*, sebagai penyuluh Pemilu, Relawan Demokrasi Kota Medan telah memenuhi perannya, dengan melaksanakan sosialisasi Pemilu serta menanamkan nilai demokrasi di seluruh lapisan masyarakat. Ditemuinya beragam perilaku saat interaksi berlangsung. *Kedua*, terdapat perbedaan model sosialisasi yang dilaksanakan yaitu penyesuaian model dengan segmentasi masyarakat, tetapi terdapat model yang serupa pula. *Ketiga*, Relawan tersebut secara umum memiliki motivasi yang berbeda-beda untuk mengikuti Program Relawan Demokrasi Pilkada 2019, yaitu: voting, mengasah skill, mengasah *public speaking*, guna menambah resume serta memajukan karir. Selain itu, adanya keinginan merubah pola masyarakat pada pelaksanaan Pemilu legislatif serta pada akhirnya menjadi pelampiasan semangat/kepentingan yang belum terlaksana.

- b) Fenomena Relawan Politik dalam Kontestasi Presidensial 2014. Ditulis oleh Arianto, Bambang (2014)

Dalam jurnal ini membahas bagaimana wujud Relawan Demokrasi sebagai perpanjangan tangan KPU di tengah bertumbuhnya partisipasi masyarakat dalam demokrasi substansial. Studi tersebut menerangkan jika kebangkitan gerakan sosial memunculkan tradisi kesukarelaan dalam politik. kemudian, kerelawanan berkontribusi menjadikan nilai politik bernuansa patriarki serta oligarki secara sukarela dan dengan partisipasi semua orang. Relawan Demokrasi yang bepergian secara offline dan online dapat meningkatkan keterlibatan publik. Salah satu

kesimpulan yang diperoleh dalam penilaian ini adalah kehadiran relawan politik memberikan kontribusi yang sangat positif bagi perkembangan model demokrasi ekstra-parlementer.

- c) Peran Relawan Demokrasi dalam Mengurangi Angka Golput pada Pemilihan Umum Legislatif 2014 (Studi Kasus Kota Surakarta). Ditulis oleh Kholidaturrosyidah (2014)

Hasil yang diperoleh yakni peran Relawan Demokrasi agar angka golput dapat berkurang pada Pemilu legislatif 2014 antara lain menyampaikan hal-hal kepada masyarakat mengenai pelaksanaan Pemilu, dan mendorongnya agar menjadi pemilih cerdas ketika mempergunakan hak pilihnya. Impelentasi program yang telah dilaksanakan sangat berpengaruh dalam menekan angka golput serta menumbuhkan partisipasi masyarakat. Kesamaan penelitian berjudul “Peran Relawan Demokrasi dalam Mengurangi Angka Golput pada Pemilihan Umum Legislatif 2014 (Studi Kasus Kota Surakarta)” dengan penelitian yang akan dilaksanakan yakni kesamaan peran oleh Relawan Demokrasi 2014 serta 2019 yakni melaksanakan sosialisasi Pemilu serta pendidikan pemilih.

1.5.2 Kerangka Teoritis

Merupakan landasan yang digunakan peneliti untuk mengaitkan temuan dan data yang diperoleh. Teori menjadi basis awal untuk menangkap realita yang akan dikaji dalam penelitian.

1.6 Partisipasi Politik

Partisipasi politik mempunyai banyak arti yang berbeda. Sejumlah ahli mengemukakan pendapat terkait partisipasi politik. Menurut Surbakti (2007),

partisipasi politik yaitu partisipasi warga negara menentukan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Pandangan lain dikemukakan oleh Huntington dan Nelson (dalam Budiardjo, 2008), yaitu aktivitas yang dilaksanakan warga negara sebagai individu untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Terakhir menurut McClosky (dalam Budiardjo, 2008) mengemukakan bahwa Partisipasi yaitu kegiatan sukarela masyarakat yang disalurkan dengan berpartisipasi pada saat proses memilih pemimpin secara langsung maupun tidak dalam proses pembentukan kebijakan publik.

Dari beberapa pendapat ahli tersebut maka yang dimaksud partisipasi politik adalah adanya kegiatan atau keikutsertaan warga negara dalam proses pemerintahan, kemudian kegiatan tersebut diarahkan untuk memengaruhi jalannya pemerintahan, sehingga dengan adanya partisipasi politik tersebut akan berpengaruh terhadap kehidupan mereka.

Dalam negara demokrasi, konsep partisipasi politik dimulai dengan pemahaman bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, yang dilakukan dengan bekerja sama untuk menentukan tujuan dan masa depan masyarakat serta memutuskan siapa yang akan memegang tampuk pemerintahan. Sehingga, partisipasi politik adalah perwujudan dari pelaksanaan kekuasaan politik yang sah oleh individu.

Partisipasi politik dibagi menjadi partisipasi aktif dan pasif. Partisipasi aktif terdiri dari usulan kebijakan publik, usulan kebijakan publik alternatif yang berbeda dengan yang ditempuh pemerintah, penyampaian kritik dan perbaikan koordinasi kebijakan, pembayaran pajak, dan pemilihan pimpinan pemerintahan. Sedangkan

tindakan yang tergolong partisipasi pasif yakni tindakan patuh kepada pemerintah dan menerima serta melaksanakan segala keputusan pemerintah.

1.7 Sosialisasi Politik

Menurut pandangan Damsar (2010) Sosialisasi politik merupakan bagian dari proses pendidikan politik yang didalamnya terdapat tujuan untuk membangun bagaimana seharusnya sikap masyarakat berpartisipasi melalui aktivitas politik dan sistem politik yang ada. Menurut Surbakti (2007) Sosialisasi politik juga bisa diartikan menjadi proses pembentukan perilaku serta orientasi politik oleh warga negara. Selain itu, Maran (2001) menjelaskan Sosialisasi politik menjadi proses dalam mengenalkan kepada masyarakat terkait sistem politik serta bagaimana tanggapannya terkait tanda-tanda politik.

Salah satu unsur paling penting yakni aktor yang berperan untuk mengadakan sosialisasi politik. Berikut adalah aktor-aktor sosialisasi politik yang ada dalam masyarakat menurut Octafitria (2018):

1. Keluarga

Aktor sosialisasi pertama yakni keluarga yang berinteraksi sejak dini dalam pembentukan karakter individu dan memiliki peran penting dalam pembentukan karakter seorang pemimpin dan bagaimana mereka berinteraksi dengan orang lain. Dampak terhadap individu melalui keluarga sangat signifikan dalam hal pembentukan sikap dan partisipasi aktif dalam interaksi politik.

2. Sekolah

Aktor sosialisasi yang kedua mempunyai peran besar guna menyempurnakan sosialisasi pertama yakni sekolah. Terbentuknya sikap serta pandangan siswa terkait pengetahuan ilmu sosial, ilmu ekonomi serta ilmu politik dipengaruhi oleh materi dan peran guru dengan gaya kepemimpinannya.

3. Kelompok Pergaulan

Kelompok pergaulan sebagai aktor yang mempunyai hubungan dekat dengan setiap individu dan dapat memotivasi orang untuk berpartisipasi dalam arena politik. Kelompok ini bersifat informal maka timbulah kemudahan guna penyesuaian pendapat serta pandangan setiap individu. Dorongan dalam meningkatkan partisipasi yakni dengan interaksi dengan sesama misal dengan saling memberi motivasi agar ikut serta kegiatan politik.

4. Media Massa

Media komunikasi beragam menjadi hal biasa bagi masyarakat modern seperti halnya smartphone, radio, serta internet sebagai penyedia informasi serta pendidikan terkait politik secara intens. Peran media massa sebagai agen sosialisasi yakni dengan menayangkan konten tentang kegiatan politik serta kondisi negara.

5. Kontak-Kontak Politik Langsung

Semua aktivitas secara langsung yang melibatkan hubungan politik. Kegiatan secara sadar maupun tak sadar yang mengakibatkan individu menjalani proses sosialisasi politik. Misalnya saat calon legislatif membawa diri dengan

keadaan/budaya politik saat berhubungan maupun berkomunikasi dengan aktivis partai lain.

1.8 Volunteerism

Volunteerism (kerelawanan) yakni bagian dari payung teori mengenai kegiatan menolong, namun berbeda dengan kegiatan menolong orang lain secara tiba-tiba seperti contoh menolong korban penyerangan atau korban penganiayaan yang mengharuskan mengambil keputusan dengan cepat.

Departemen Pendidikan Nasional (2008) menjelaskan kata relawan mengacu pada kata sukarelawan yang artinya seseorang dengan senang hati untuk membantu orang yang membutuhkan tanpa adanya paksaan. Dengan istilah lain relawan ialah individu yang melakukan suatu hal secara sukarela untuk menolong seseorang yang membutuhkan tanpa syarat apapun dan tanpa mengharapkan imbalan.

Schroeder (dalam Rizkiawati, 2017) menyatakan relawan merupakan individu secara sukarela menyumbangkan tenaga serta jasanya seperti keahlian atau waktu tanpa mengharapkan imbalan atau menunggu keuntungan materil dari organisasi yang menyelenggarakan kegiatan tertentu. Aktivitas relawan sifatnya sukarela tanpa mengharapkan imbalan pihak luar.

Wilson (2000) mendefinisikannya sebagai kegiatan memberikan waktu secara sukarela dengan tujuan membantu orang lain, kelompok, atau organisasi. Dalam perspektif Sosiologi "*volunterisme*" yakni fenomena sosial dengan melibatkan pola hubungan sosial serta interaksi yang dilangsungkan individu kelompok maupun organisasi. Istilah "*volunterisme*" tak pisah dari kata

“volunteer”. *“volunterisme”* sebagai tindakan nya serta *“volunteer”* sebagai orang yang melakukannya.

Merujuk pemaparan yang telah dijelaskan, Relawan yakni individu dengan tidak mempunyai kewajiban dalam menolong pihak terkait namun mempunyai dorongan agar berkontribusi secara nyata dalam kegiatan yang membutuhkan kerelaan untuk mengorbankan waktunya, tenaganya, pikirannya serta materi untuk diberikan ke orang lain.

Dalam bagian lain Omoto & Snyder (dalam Misgiyanti, 1997) memberikan perspektif tentang karakteristik relawan, diantaranya:

1. Selalu mencari peluang untuk menolong
2. Berkomitmen dalam waktu jangka panjang
3. Membutuhkan biaya pribadi yang tinggi (waktu, tenaga, dan sebagainya)
4. Individu yang dibantu telah diatur oleh organisasi tertentu serta keaktifan mereka dalam organisasi tersebut, karena mereka tidak mengenal individu yang mereka bantu
5. Bukan suatu keharusan untuk menolong seseorang.

1.6 Operasionalisasi Konsep

1.6.1 Definisi Konsep

1. Peranan

Peranan merupakan suatu tindakan yang dilakukan seseorang atau suatu kelompok. Peran yang harus dijalankan oleh seseorang/kelompok biasanya diatur dalam suatu ketetapan yang merupakan tujuan dari lembaga tersebut. Mereka yang dibebani peran tersebut harus menjalankannya dengan penuh tanggung jawab.

2. Partisipasi Politik

Partisipasi politik merupakan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dapat mempengaruhi pengambilan keputusan melalui proses Pemilihan Umum secara langsung maupun tidak langsung. Penelitian ini lebih fokus kepada partisipasi politik masyarakat dengan melihat jumlah pemilih (*voter turnout*) yang berarti persentase atau populasi usia pemilihan (atau persentase pemilih yang terdaftar) yang benar-benar hadir untuk memilih dalam Pemilu.

3. Relawan Demokrasi

Program Relawan Demokrasi itu sendiri merupakan program yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu tahun 2019. Mereka bertugas untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang telah disesuaikan dengan masing-masing basis kelompoknya.

1.6.2 Definisi Operasional

Berdasarkan pemaparan dari definisi konseptual diatas, penulis kemudian merumuskan definisi operasional sebagai berikut:

1. Peranan Relawan Demokrasi

Memfokuskan pada tugas dan tanggung jawab dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Dengan memperhatikan kontribusi dan dedikasi relawan, tanggung jawab dimana mereka ditempatkan yaitu sesuai basis pemilih serta cara penyampaian materi yang dilakukan Relawan Demokrasi

2. Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu tahun 2019

Partisipasi masyarakat adalah mereka yang menggunakan hak suaranya dalam Pemilu serentak 2019. Dalam pemberian hak suara tersebut, masyarakat didasarkan dengan beberapa alasan yang menjadikan masyarakat mau untuk datang ke TPS dan memberikan hak suaranya.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Desain Penelitian

Berdasarkan penelitian yang diteliti, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Menurut Creswell (2010) penelitian kualitatif merupakan metode yang dipakai guna menemukan serta memahami makna yang asalnya pada problematika sosial ataupun kemanusiaan. Proses ini melibatkan upaya yang lumayan besar, meliputi pengajuan pertanyaan serta prosedur, pengumpulan data spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif dari topik khusus menuju topik umum serta menjelaskan makna data. Desain yang diambil penelitian yakni kualitatif komparatif yang mencoba membandingkan dua atau lebih variabel. Aswarni Sudjud (dalam Arikunto, 2010) menjelaskan dapat ditemukannya persamaan serta perbedaan mengenai objek, orang, proses kerja, gagasan, penilaian terhadap orang lain, kelompok, terhadap gagasan tertentu mempergunakan penelitian komparasi. Hal yang dibandingkan dalam hal ini yakni peran Relawan Demokrasi di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki tingkat partisipasi tertinggi dan terendah (Kota Salatiga, Kabupaten Brebes) pada Pemilu tahun 2019.

1.7.2 Situs Penelitian

Situs penelitian yakni lokasi dilaksanakannya penelitian. Langkah yang penting dalam penelitian kualitatif yakni menentukan lokasi penelitian, karena ketika lokasi ditentukan kemudian situasi muncul, maka akan mudah untuk mengeksplorasi tujuan dan subjek secara rinci. Lokasi penelitian ini di wilayah Provinsi Jawa Tengah tepatnya di Kota Salatiga serta Kabupaten Brebes.

1.7.3 Subjek Penelitian

Dalam buku Moleong (2010) menjelaskan subjek penelitian sebagai informan, yaitu orang yang berpartisipasi dalam penelitian yang digunakan agar memberikan informasi terkait konteks serta kondisi penelitian. Dalam penelitian kualitatif, yang dimaksud subjek penelitian adalah informan yang memberikan data. Adapun ruang lingkup subjek penelitian ini adalah:

1. Komisioner KPU Provinsi Jawa Tengah, KPU Kota Salatiga, KPU Kabupaten Brebes
2. Bawaslu Kota Salatiga dan Bawaslu Kabupaten Brebes
3. Organisasi Masyarakat Sipil
4. Anggota Relawan Demokrasi
5. Masyarakat Pemilih

1.7.4 Jenis Data

Data yang digunakan berupa teks atau kalimat tertulis, frasa ataupun simbol yang mewakili kondisi seseorang, perilaku, kejadian dalam kehidupan sosial. Sumber data disajikan berupa wawancara serta teks dokumen. Penelitian kualitatif menjadi jenis data yang diambil dengan konsep yang digambarkan dalam kata-kata

untuk mengetahui pandangan tentang Peran Relawan Demokrasi KPU dalam pelaksanaan Pemilu 2019 di Provinsi Jawa Tengah serta peluang dan hambatan yang dialami saat program tersebut dijalankan.

1.7.5 Sumber Data

Data merupakan faktor penting dalam penelitian. Berdasarkan masalah penelitian data yang digunakan untuk memecahkan masalah. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengumpulan atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari data wawancara, observasi dan foto dari informan yang meliputi data relevan dengan penelitian.

b. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain atau secara tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data Sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia yang diperoleh dari otoritas atau pihak yang berwenang dan mempunyai efisiensi yang tinggi.

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian. Pada penelitian kali ini peneliti memilih dua jenis penelitian kualitatif yang di harapkan mampu memberikan data yang valid. Cara yang dilakukan yaitu:

a) Metode Wawancara

Metode ini adalah kegiatan dialog yang dilakukan pewawancara terhadap informan untuk mendapatkan informasi-informasi yang diinginkan. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan Komisioner KPU Jawa Tengah, KPU Kota Salatiga, KPU Kabupaten Brebes, Bawaslu Kota Salatiga dan Bawaslu Kabupaten Brebes, Organisasi Masyarakat Sipil, anggota Relawan Demokrasi dan masyarakat pemilih dari masing-masing daerah. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara mendalam (*In Depth Interview*) dan terbuka yaitu metode wawancara secara online dengan memanfaatkan media seperti *zoom meeting* dan *whatsapp* serta memberikan pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan penelitian untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan oleh informan.

b) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu pengumpulan data dengan mencari informasi dari data yang sesuai dengan topik penelitian melalui dokumen tertulis. Dalam penelitian ini, dokumen yang digunakan untuk mendukung data hasil wawancara adalah berupa artikel di media massa mengenai subyek pada subyek satu dan dua, dokumen yang berupa arsip data, serta dokumentasi peneliti.

1.7.7 Analisis dan Interpretasi Data

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2019) bahwa analisis data kualitatif dilakukan dengan cara interaktif sama lain, serta berlanjut secara terus menerus sampai tuntas, sehingga data sudah jenuh (tidak ada perbedaan). Tahapan analisis data tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Tahap Reduksi Data

Data yang diperoleh jumlahnya yang cukup banyak dari proses pengumpulan data melalui catatan lapangan, wawancara, rekaman, data yang sudah tersedia maka perlu dilakukan perangkuman (*data summary*) memberikan code (*coding*), merumuskan temanya, mengelompokkan (*clustering*) dan menyajikan dalam bentuk narasi.

2. Tahap Penyajian Data

Mengkonstruksikan secara singkat dan terstruktur sebagai dasar pengambilan keputusan dan mengaplikasikan. Penyajian data merupakan bagian kedua dari tahap. Peneliti perlu menganalisis proses reduksi data untuk memahami intinya. Penyajian data yang lebih difokuskan dalam bentuk ringkasan yang terstruktur dan sinopsis.

3. Tahap Pengambilan Kesimpulan

Tahap pengambilan kesimpulan dan verifikasi, peneliti membuat interpretasi, dan mengartikan data yang diperoleh untuk memastikan kebenarannya maka perlu membandingkan antara pola, tema dan kelompoknya melalui triangulasi.

1.7.8 Penarikan Simpulan

Langkah terakhir dalam penelitian yakni penarikan kesimpulan. Pelaksanaan penarikan kesimpulan secara terus menerus ketika masih melakukan penelitian di lapangan. Mulainya ketika awal proses mengumpulkan data, perlunya

peneliti mencari arti benda, mencatat pola, penjelasan, alur sebab-akibat serta proporsinya. Sifat dari kesimpulan yakni terbuka serta longgar, namun harus tetap disediakan.

1.7.9 Kualitas Data (*goodnews criteria*)

Setelah melakukan penelitian dan mendapatkan sejumlah informasi yang diinginkan, peneliti melakukan uji coba atau memeriksa kembali data yang diperolehnya apakah telah sesuai dengan sumber serta dapat dipertanggungjawabkan dan tidak dipergunakan dengan sembarangan.